



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

DENGAN

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK

NOMOR : 002/HK.02/K.JI-16/10/2025

NOMOR : UPDN/114/AK.595/X/2025

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF, LITERASI DEMOKRASI, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Nganjuk yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Yudha Hamanto, SH., MH, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan, Kedondong, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Myaskur, M.H adalah Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang berkedudukan di Jl. Wilis, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung pendidikan Kepemiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman demokrasi dan kepemiluan di lingkungan pendidikan, dan;
 - b. Mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- 2) Peningkatan kesadaran hak pilih dalam demokrasi elektoral;
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan kepemiluan serta sosialisasi partisipasi pemilih;
- 4) Diseminasi semua peraturan perundang-undangan pemilu, regulasi, dan keputusan Bawaslu;
- 5) Pemanfaatan segala fasilitas kedua belah pihak berkaitan dengan laboratorium pengawasan kepemiluan.
- 6) Melaksanakan kegiatan lain yang disetujui para PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

PASAL 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

PASAL 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

PASAL 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir. (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADDENDUM

PASAL 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Jalan Raya Kedondong No.02, Sanggrahan, Kedondong, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Telepon : 0813-2876-7445

Email : set.nganjuk@bawaslu.go.id

- b. PIHAK KEDUA Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Wilis, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Telepon : 0822-30000-662

Email : htn@updn.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu

KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN NGANJUK**

Pihak Kedua

KETUA PROGRAM STUDI

**HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS
PANGERAN DIPONEGORO
NGANJUK**


YUDHA HARNANTO, SH.,MH **Dr. HASKUR, M.H**